Kontan
Harian Bisnis & Investasi

Tanggal : 14 Juni 2013

Halaman : 20

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Proyek Jalan Tol, Jalan di Tempat

JAKARTA. Banyaknya realisasi proyek pembangunan infrastruktur yang mandek, terutama jalan tol, membuat sektor ini mendapat rapor merah dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Jika semula pemerintah mematok target pembangunan jalan tol sepanjang 1.296 kilometer (km) di RPJMN, realisasi hingga akhir 2012 cuma 0,23% atau sepanjang 296 km. "Tahun ini kami ingin ada penyelesaian jalan tol 100 km," kata Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Prihartono, Kamis (13/6).

Sejumlah proyek yang akan digenjot penyelesaiannya tahun ini adalah tol Medan–Kualanamu yang merupakan jalan akses ke bandara di Sumatera Utara. Selain itu tol Trans Jawa, ruas Cileunyi–Sumedang –Dawuan (Cisumdawu) di Jawa Barat, tol Solo–Ngawi–Kertosono di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah juga menyiapkan dana Rp 2 triliun untuk mendukung pembangunan jalan tol itu.

Minimnya realisasi pembangunan jalan tol karena pemerintah kesulitan melakukan pembebasan lahan. Dia berharap dengan adanya Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang saat ini masih dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa menjadi angin segar dalam menangani sengketa lahan masyarakat saat proses pembebasan lahan.

Lambatnya realisasi proyek jalan tol yang ditargetkan oleh RPJMN ini tak lepas dari peran pemerintah yang juga lambat dalam mengambil kebijakan. Sebab tim pembebasan lahan terdiri dari unsur pemerintah di daerah.

Selain itu, pemerintah selama ini juga terkesan lamban dalam membelanjakan anggaran untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur. Misalnya tahun ini dari alokasi dana belanja konstruksi sekitar Rp 300 triliun, hingga pertengahan Juni 2013 baru 20%-25% yang digunakan.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Hediyanto W. Husaini bilang, penyerapan belanja konstruksi ini bisa membaik di akhir tahun. Sebab musim pencairan dana belanja infrastruktur pemerintah ini biasanya terjadi di akhir tahun.

Fahriyadi, Enggo Margarita K